

SEJARAH DAN PEKEMBANGAN KEDUDUKAN KAISAR DI JEPANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra



ADE IRMA SETIAWAN

NIM.2010110052

PROGRAM STUDI SASTRA JEPANG

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2014

LEMBARPERNYATAAN

Skripsi dengan judul **Sejarah dan Perkembangan Kedudukan Kaisar di Jepang** adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ade Irma Setiawan

NIM : 2010110052

Tanda tangan : 

Tanggal : 11 Agustus 2014



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diajukan pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2019

Oleh
DEWAN PENGUJI
yang terdiri dari :

Pembimbing : Dr. Nani Dewi Sunengsih, S.S, M.Pd (.....)
Pembaca : Syamsul Bachri, S.S, M.Si (.....)
Ketua Sidang : Dra. Yuliasih Ibrahim (.....)


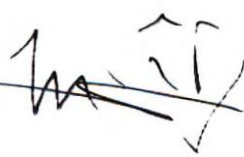
Disahkan pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2019

Ketua Jurusan Sastra Jepang,

Dekan Fakultas Sastra,



Hargo Saptaji, SS., M.A



FAKULTAS SASTRA
Syamsul Bachri, S.S, M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan kepada penulis, baik berupa kesehatan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Sejarah dan Perkembangan Kedudukan Kaisar di Jepang** tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program studi S1 Fakultas Sastra jurusan Jepang Universitas Darma Persada.

Dalam penulisan ini, penulis mendapatkan bimbingan serta pengarahan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya penulisan skripsi ini :

1. Ibu **Dr. Nani Dewi Sunengsih, S.S., M.Pd** selaku dosen pembimbing dan “Ibu Peri” yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya yang sangat berharga untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Syamsul Bahri, S.S., M,Si** selaku pembaca skripsi yang telah menyediakan waktunya untuk membaca skripsi ini.
3. Ibu **Dra. Yuliasih Ibrahim** selaku Ketua Sidang.
4. Ibu **Indun Roosiani, S.S., M,Si** selaku pembimbing akademik.

5. Bapak **Hargo, S.S., M.A** selaku ketua jurusan sastra jepang.
6. Para Dosen dan karyawan Universitas Darma Persada, khususnya Fakultas Sastra jurusan Sastra Jepang.
7. Kedua orang tua, kakak –kakak, serta keluarga besar yang selalu memberikan do'a, dorongan moral, serta spritual yang sangat berarti.
8. Sahabat – sahabat terbaik, **Retno, Acay, Danti, Akbar**, yang sama – sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir, serta wanita – wanita luar biasa, **Gita, Paka, April, Fanka, Ulan**, atas bantuan, motivasi, dan saran – saran yang sangat berarti.
9. Teman –teman UNSADA khususnya sastra jepang angkatan 2010 dan 2011 yang telah memberikan motivasi, serta seluruh orang – orang yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif demi kesempurnaan karya tulis.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis pribadi dan pembaca pada umumnya.

Penulis

Ade Irma Setiawan

ABSTRAK

Nama : Ade Irma Setiawan

NIM : 2010110052

Program Studi : SI Sastra Jepang

Judul : Sejarah dan Perkembangan Kedudukan Kaisar di Jepang

Jepang merupakan negara kekaisaran, namun sepanjang sejarahnya kaisar di Jepang tidak berkuasa secara penuh. Dari zaman ke zaman kedudukan kaisar di Jepang berubah – ubah. Jepang pernah diatur oleh suatu kelompok yang disebut *klan, sessho kanpaku, shogun*, militer dan perdana menteri. Namun demikian, meski kaisar tidak memerintah secara langsung, tetapi kaisar tidak pernah ditiadakan, kaisar ditempatkan sebagai legalitas negara, lambang negara, kesatuan negara dan sangat dihormati. Kaisar di Jepang sangat di hormati karena masyarakat Jepang percaya bahwa kaisar adalah keturunan Dewa Matahari. Dewa Matahari merupakan dewa yang kedudukannya tertinggi dari dewa – dewa yang ada.

Kata kunci: Kedudukan dan kaisar

概要

名前 : アデ イルマ セチアワン
学生番号 : 2010110052
文学部 : 日本文学
題名 : 『日本では天皇の身分を歴史と発展している』

日本は帝国の国ですが、日本の天皇が歴史を通して権力完全ではない。日本の天皇の身分は期間ごとにいつも変化する。日本は氏族、摂政関白、将軍、軍と首相によって支配することがない。しかし、天皇は直接支配しませんでした。天皇が廃止されることはなかったが、天皇は国家の合法性、紋章、国家統一のように配置され非常に尊敬する。日本人にとって、天皇は太陽神の子孫として信じているから日本で非常に尊敬される。太陽神は最高神の神が存在する位置の神である。

キーワード : 身分と天皇

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAA	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
BABI PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Landasan Teori	7
1. Kedudukan	7

2. Pemerintahan	9
3. Kaisar	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penulisan	12

BAB II GAMBARAN JEPANG

A. Profil Negara Jepang	13
B. Bentuk Pemerintahan Jepang	14
C. Awal Terbentuknya Negara Jepang	15
D. Pembabakan Zaman di Jepang	
1. Zaman Prasejarah Jepang	
a. Zaman Paleolitik	17
b. Zaman Jomon	17
c. Zaman Yayoi	18
d. Zaman Kofun	19

2. Zaman Awal Sejarah Jepang

- a. Zaman Yamato..... 19
- b. Zaman Asuka 20
- c. Zaman Nara 22
- d. Zaman Heian 23

3. Zaman Feodal

- a. Zaman Kamakura 25
- b. Zaman Muromachi..... 26

4. Zaman Peralihan

- a. Zaman Azuchi Momoyama 27
- b. Zaman Edo 28

5. Zaman Modern

- a. Zaman Meiji 29

b. Zaman Taisho	30
c. Zaman Showa	31
d. Zaman Heisei	31

BAB III SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KEDUDUKAN KAISAR

DI JEPANG

A. Pengertian Kaisar Mengacu pada teori.....	33
B. Sejarah Awal Kaisar Jepang	33
C. Makna Kaisar Bagi Masyarakat Jepang	35
D. Perkembangan Kedudukan Kaisar	
1. Kedudukan Kaisar Zaman Yamato	35
2. Kedudukan Kaisar Zaman Asuka.....	36
3. Kedudukan Kaisar Zaman Nara	37
4. Kedudukan Kaisar Zaman Heian.....	38
5. Kedudukan Kaisar Zaman Kamakura	40
6. Kedudukan Kaisar Zaman Muromachi	42
7. Kedudukan Kaisar Zaman Edo.....	43
8. Kedudukan Kaisar Zaman Meiji	44

9. Kedudukan Kaisar Zaman Taisho 50
10. Kedudukan Kaisar Zaman Showa 50
11. Kedudukan Kaisar Zaman Heisei (Setelah
Pendudukan Sekutu di Jepang-Sekarang) 56

BAB IV KESIMPULAN 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak yang dapat dikaji tentang Jepang, di antaranya tentang keberadaan kaisar di Jepang di mana Jepang merupakan negara modern satu – satunya yang kepala negaranya seorang kaisar. Sebagaimana diketahui, sebagai kepala negara tentunya kaisarlah yang seharusnya memegang kekuasaan pemerintahan, namun pada kenyataannya di Jepang sekarang dipimpin oleh seorang perdana menteri.

Jepang dipimpin oleh perdana menteri sejak adanya konstitusi baru Jepang menggantikan Konstitusi Meiji. Berdasarkan konstitusi baru yang diumumkan secara resmi pada 3 November 1946 dan mulai berlaku pada 3 Mei 1947, kaisar tidak lagi berkuasa secara mutlak sebagaimana yang tercantum pada Konstitusi Meiji. Dalam konstitusi baru, kaisar dinyatakan sebagai lambang negara, kesatuan rakyat dan dalam kehidupan sehari-hari, kaisar tidak mempunyai kekuasaan yang ada kaitannya dengan pemerintahan. Dengan demikian, fungsi kaisar sebagai kepala negara hanyalah sebagai seremonial saja. Kaisar Jepang hanya bertindak sebagai kepala negara yang mengurus segala urusan yang berhubungan dengan diplomatik.

Ada hal yang menarik dari pergantian kepemimpinan Jepang dari seorang kaisar menjadi seorang perdana menteri yang terjadi pasca Perang Dunia II. Hal ini berkaitan dengan pecahnya Perang Dunia II, di mana Jepang yang banyak melakukan agresi ke berbagai negara, pada akhirnya harus menyerah kalah dan diduduki sekutu, serta harus menerima kenyataan adanya penggantian konstitusi untuk mengganti kedudukan kaisar di Jepang.

Pada saat itu, sekutu berkesimpulan bahwa agresi Jepang tersebut tidak lepas dari kepemimpinan seorang kaisar yang mutlak, maka sekutu merasa perlu untuk membatasi kekuasaan seorang kaisar. Padahal bila dikaji dari sejarahnya, kaisar di Jepang ditempatkan sedemikian rupa oleh masyarakatnya, dalam arti sangat di hormati karena kaisar di Jepang di percaya adalah keturunan Dewa Matahari.

Menurut sejarah Jepang, disebutkan bahwa Dewa Matahari ini memerintahkan cucunya yang bernama Ninigi no Mikoto turun ke bumi Jepang untuk mengatur pemerintahan yang pada saat itu selalu berperang antar suku. Kemudian cucu Ninigi no Mikoto yang bernama Kan Yamato Iwarehiko no Mikoto dengan anak buahnya menyusuri pantai Timur bagian Utara Kyushu hingga sampai ke Yamato (Propinsi Nara sekarang). Setelah menaklukan Yamato pada 660 SM ia mulai memerintah dengan mengangkat dirinya sebagai kaisar dengan sebutan Kaisar Jinmu. Sebagai keturunan Dewa Matahari, maka kaisar di Jepang sangat di hormati. (Yeti Nurhayati, 1987. hlm 1)

Menurut kepercayaan orang Jepang, Dewa Matahari ini merupakan Dewa yang tertinggi kedudukannya, karena itu mereka sangat mengagungkannya. Kaisar dianggap sebagai keturunan serta wakil para dewa di bumi, maka orang Jepang pun mengadakan pemujaan terhadap kaisar. Cara ini kemudian menjadi kepercayaan tertinggi bagi bangsa Jepang yang terkenal dengan sebutan agama Shinto. Melalui Shinto ini terjadi pemujaan terhadap kekuasaan negara dengan kaisar sebagai lambangnya.

Menurut *Nihonshoki* (kronikel sejarah Jepang yaitu dari zaman dewa – dewa sampai zaman kaisar yang ditulis pada tahun 720), kedudukan kaisar setelah Kaisar Jinmu, dipangku oleh keturunannya secara turun – temurun. Mereka memerintah dari pusat kekaisaran yang awalnya didirikan di propinsi Yamato. Dengan bangkitnya suku Yamato dan mulainya kekaisaran Jepang yang diperintah oleh kaisar sebagai keturunan dewa, maka terkecuali suatu masa yang sangat pendek yaitu 60 tahun pada abad ke-14, negeri ini sudah diperintah oleh hanya

sebuah keluarga secara turun – temurun sejak tahun 660 SM yaitu sebagai tahun permulaan sejarah kaisar dan dikenal dengan nama zaman Yamato.

Pada zaman Yamato, selama empat abad terus - menerus, suku Yamato dapat menaklukan sebagian wilayah Jepang. Dengan sering terjadinya peperangan atau penolakan – penolakan, maka terbentuk watak militer pada masyarakatnya. Namun begitu, meski kekuasaannya sudah meluas, mereka belum memiliki sistem pemerintahan yang terpusat, dan suku Yamato masih terdiri dari daerah – daerah yang diperintah oleh gabungan – gabungan keluarga yang disebut *Uji*. Kepala *Uji* disebut *Ujigumi* yang mempunyai fungsi sakral yaitu sebagai pendeta. Gelar tersebut diperoleh secara turun – temurun. Adapun masyarakatnya tersusun dalam gabungan – gabungan keluarga yang terdiri dari golongan bangsawan yang mempunyai tanah sendiri dan golongan pekerja sebagai bawahan atau budak – budaknya yang sangat setia. (Yeti Nurhayati, 1989. hlm 2)

Suku Yamato pada awalnya tidak mempunyai tempat kedudukan yang tetap. Pada waktu itu menjadi kebiasaan apabila terjadi pergantian kaisar, maka ibu kotanya juga pindah. Hal ini disebabkan setiap kaisar baru membangun istana baru kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke tempat istana baru itu. Adalah Kaisar Gemyo (661-721) yang memilih kedudukan tetap untuk pusat pemerintahannya yaitu di Propinsi Yamato yang diberinya nama *Heikyojo* yang kemudian berganti nama menjadi Nara. Ada 7 orang kaisar yang memerintah di Nara selama 74 tahun, karena itulah dalam sejarah Jepang dikenal sebagai zaman Nara (794).

Selanjutnya, dari Nara ibu kota dipindahkan ke Nagao – Kakyō di Propinsi Yamashiro. Sepuluh tahun kemudian dibangun ibu kota baru yang indah bernama Heian-kyō. Kota itulah yang kemudian menjelma menjadi kota Kyoto sekarang. Pusat pemerintahan di situ, berlangsung selama empat abad lamanya. Masa tersebut dikenal sebagai zaman Heian.

Dengan pemindahan ibu kota ke Heian yang dilakukan oleh Kaisar Kanmu, maka dimulailah suatu zaman baru dalam sejarah Jepang, di mana keluarga bangsawan yang bernama Fujiwara kedudukannya sangat kuat. Saat itu, tepatnya memasuki abad ke-8, para pegawai tinggi istana dan para bangsawan sebagian besar adalah keluarga Fujiwara. Fujiwara diangkat menjadi perdana menteri oleh Kaisar Montoku, kemudian pada tahun 866 keluarga Fujiwara memberlakukan sistem perwalian yang disebut *Sesho Kanpaku* yaitu jika kaisar yang naik tahta masih dibawah umur, maka harus diangkat wali kaisar (*sessho*) yang dipegang oleh anggota keluarga Fujiwara. Apabila kaisar sudah dewasa, maka ia harus didampingi oleh seorang pendamping yang bertugas melaksanakan tugas – tugas kaisar. Jabatan ini disebut *Kanpaku* dan biasanya dipegang oleh bekas wali tadi. (Yeti Nurhayati, 1987. him 7).

Setelah zaman Heian, kekuasaan kaisar hanya menjadi lambang negara saja karena kekuasaan sebenarnya dipegang oleh panglima militer atau *shogun*, namun demikian kedudukan kaisar tidak dihilangkan dan setelah Kaisar Jinmu, suku Yamato tak putus –putusnya menjadi kaisar di Jepang, sehingga sekarang merupakan suku yang paling tua yang memerintah terus –menerus di dunia, setelah zaman Heian berakhir, kebijakan ada ditangan *shogun*. *Shogun* adalah panglima militer. Pemerintahan *Shogun* dimulai dari 1192 sampai 1868 dan disebut dengan pemerintahan *bakufu*, pemerintahan *bakufu* terdiri dari *Bakufu Kamakura*, *Bakufu Muromachi* dan *Bakufu Edo*. Pemerintahan oleh *shogun* yang pertama adalah pemerintahan *Bakufu Kamakura* dengan kaisar pertama Yoritomo Minamoto. Yoritomo Minamoto dianugrahi gelar *shogun* oleh kaisar karena keberhasilannya dalam mengatur pemerintah.

Permulaan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang *shogun* dapat dianggap sebagai permulaan berlakunya sistem feodal di Jepang yang menyebabkan terciptanya ikatan yang kuat antara tuan dan hambanya di wilayah. Pada masa pemerintahan *bakufu* ini ada upaya untuk mengembalikan kekuasaan pada kaisar yang dilakukan oleh Kaisar Gotoba pada 1221, tetapi serangan itu dapat

digagalkan dan akibatnya kekuasaan kaisar semakin ditekan. Tanah milik keluarga yang berkomplot dengan Kaisar Gotoba dibagikan kepada pengikut – pengikut *bakufu* yang setia. Upaya Kaisar Gotoba tersebut dilanjutkan oleh Kaisar Godaigo, tetapi tidak berhasil bahkan ditangkap dan diasingkan ke Pulau Oki di laut Jepang tepatnya 1332. Kaisar Godaigo pada akhirnya dapat melepaskan diri dari pengasingan tersebut dan dapat mengalahkan *bakufu* berkat bantuan jenderal yang membelot dari *bakufu*. Kekuasaan Kaisar Godaigo tidak berlangsung lama karena kaisar dianggap lebih menganakemaskan kaum bangsawan dan para pendeta dari pada para jenderal yang telah menolongnya, maka pada 1336 Kaisar Godaigo dikalahkan dan terusir dari Kyoto. (Dozi Swandana, 2009. hlm 21).

Pada 1338 setelah Kaisar Godaigo terusir dari Kyoto, Takauji seorang jenderal yang membantu Kaisar Godaigo dalam merebut kekuasaannya sebagai kaisar pada 1333, mengangkat kaisar baru dan ia sendiri mendirikan pemerintahan bakufu dengan dia sendiri sebagai *shogunnya*, maka sejak saat itu terjadi dua pemerintahan kaisar secara bersamaan yakni di Kyoto yang disebut pemerintahan Selatan dan di Yoshino yang disebut pemerintahan Utara. Adapun pemerintahan di Jepang dikuasai oleh *shogun* tepatnya pada pemerintahan *Bakufu Muromachi*.

Ketika *Bakufu Muromachi* berakhir, pemerintahan oleh *shogun* masih terus berlangsung dibawah pimpinan *shogun* masa pemerintahan *Bakufu Edo*. Pada masa pemerintahan *Bakufu Edo* ini banyak peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan roda pemerintahan dan berakhir dengan pengembalian kekuasaan dari *shogun* ke kaisar, zaman ini disebut zaman Meiji. Namun demikian, pada pemerintahan Meiji ini kekuasaan dikendalikan oleh militer. Begitu pula ketika zaman Meiji berakhir sampai tepatnya pasca Perang Dunia II, kaisar tidak mempunyai kekuasaan secara mutlak karena pemerintahan Jepang pasca Perang Dunia II dikendalikan oleh perdana menteri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang kedudukan kaisar di Jepang dengan tema, sejarah dan perkembangan kedudukan kaisar di Jepang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: Jepang merupakan negara kekaisaran yang seharusnya diperintah oleh seorang kaisar. Namun demikian, peranan kaisar dalam pemerintahan Jepang mengalami pasang surut. Ada masanya kaisar hanya sebagai legalitas negara saja karena kekuasaan sebenarnya dipegang oleh suatu kelompok, *sessho kanpaku*, dan panglima militer atau *shogun*. Setelah Perang Dunia II, kaisar juga hanya menjadi lambang negara, karena pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, pembatasan masalah pada penelitian ini adalah mengenai sejarah dan perkembangan kedudukan kaisar di Jepang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana makna kaisar di Jepang?
2. Bagaimana sejarah dan perkembangan kedudukan kaisar di Jepang ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Makna kaisar di Jepang
2. Sejarah dan perkembangan kedudukan kaisar di Jepang

F. Manfaat Penelitian

Bagi penulis dapat menambah wawasan tentang sejarah dan perkembangan kedudukan kaisar di Jepang.

G. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kedudukan

Kedudukan dapat diartikan sebagai status atau pun posisi di mana sesuatu itu ditempatkan. Kedudukan merupakan salah satu unsur pokok dalam sistem *stratifikasi* masyarakat (pembedaan atau pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal (bertingkat)). Kedudukan sering kali dibedakan dengan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut. Sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain, lingkungan pergaulan, prestasinya, hak –hak serta kewajiban – kewajibannya. Kedudukan sosial tidak hanya kumpulan kedudukan seseorang dalam kelompok yang berbeda, tetapi kedudukan sosial dapat mempengaruhi kedudukan seseorang dalam kelompok sosial yang berbeda. (Bagja Waluyu, 2007.hlm 23)

Pada umumnya kedudukan dapat dibedakan menjadi 3 ciri, sebagai berikut:

- a. *Ascribed status*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan –perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula. Pada umumnya *ascribed status* dijumpai pada masyarakat dengan sistem

lapisan tertutup, misalnya masyarakat feodal, atau masyarakat tempat sistem lapisan bergantung pada perbedaan rasial. (Bagja Waluya, 2007. hlm 23)

- b. *Achieved status*, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha – usaha yang disengaja. Misalnya, setiap orang dapat menjadi seorang dokter asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut bergantung pada yang bersangkutan bisa atau tidak menjalaninya. Apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, ia tidak akan mendapat kedudukan yang diinginkannya. (Bagja Waluya, 2007. hlm 23)
- c. *Assigned status*, merupakan kedudukan yang diberikan kepada seseorang. Kedudukan ini mempunyai hubungan yang erat dengan *achieved status*. Artinya, suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. (Bagja Waluya, 2007. hlm 23)

Menurut Pitirim Sorokin, untuk mengukur kedudukan (status) seseorang dapat di lihat dari : 1) Jabatan / pekerjaan, 2) Ilmu Pengetahuan, 3) Kekayaan, 4) Agama, dan 5) politis / keturunan. (http://alhada-fisipll.web.unair.ac.id/artikel_detail-45465-Makalah-Stratifikasi%20Sosial.html)

Menurut Soerjono Soekanto, dimensi stratifikasi sosial (pengelompokan masyarakat secara bertingkat) meliputi : 1) Kekayaan, 2) Kekuasaan, 3) Ilmu Pengetahuan, 4) Penghormatan, 5) Kesolehan, dan 6) Agama. (Janu Murdiyatmoko, 2007. hlm 15).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan hak – hak dan kewajibannya.

2. Pemerintahan

Pemerintah (*government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani, "Memerintah" berarti melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah – langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan. (Ramlan Surbakti, 1992.hlm 167).

Sementara itu istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya. Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara.

Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika), struktural fungsional dan dari segi tugas dan kewenangan (fungsi). Apabila ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Ditinjau dari segi struktural fungsional, pemerintah berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar –dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Lalu ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara, pemerintah berarti seluruh tugas dan kewenangan negara. (Ramlan Surbakti, 1992 .him 168).

Berdasarkan tiga aspek di atas pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara (fungsi negara). Yang melaksanakan tugas dan kewenangan negara ialah pemerintah. Sehubungan dengan pengertian pemerintahan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan fungsi negara, perlu dikemukakan pengertian pemerintah dalam arti luas dan arti sempit.

Pemerintahan dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja. Demikian pula, dengan pengertian pemerintahan dalam arti luas berarti seluruh aparat yang melaksanakan fungsi – fungsi negara, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit menyangkut aparat eksekutif, yaitu kepala pemerintahan dan kabinetnya. (Ramlan Surbakti.1992.hlm 169).

a. Menurut C.F. Strong

Pemerintahan dalam arti luas berarti kewenangan untuk kedamaian dan keamanan, baik ke dalam maupun ke luar. Oleh sebab itu, sebuah negara harus memiliki kekuasaan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Sebuah negara juga harus memiliki kekuasaan legislatif, dalam arti kemampuan membuat dan merancang undang – undang. Bukan itu saja, sebuah negara juga harus mempunyai dan memiliki kekuatan finansial yang kuat atau kemampuan untuk memenuhi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai anggaran keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan – peraturan negara. (<http://ourgovernments.blogspot.com/2013/05/teori-pemerintahan-menurut-beberapa-ahli.html>)

b. Menurut R.Mac Ivey

Pemerintahan adalah sebuah organisasi yang berasal dari sekelompok orang – orang yang mempunyai kekuasaan. (<http://ourgovernments.blogspot.com/2013/05/teori-pemerintahan-menurut-beberapa-ahli.html>).

c. Menurut Samuel Edward Finer

Finer menyatakan bahwa istilah *government* mempunyai empat arti, yaitu:

1. Menunjuk kegiatan atau proses pemerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak – pihak lain.
2. Menunjukkan masalah – masalah negara, dimana kegiatan atau proses di atas dijumpai.
3. Menunjukkan orang – orang yang diberi tugas untuk memerintah.
4. Menunjukkan cara, metode, atau sistem dimana suatu masyarakat diperintah. (<http://ourgoverments.blogspot.com/2013/05/teori-pemerintahan-menurut-beberapa-ahli.html>)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara.

3. Kaisar

Kata kaisar berasal dari bahasa Latin *caesar* yang mulanya adalah sebuah nama dari kaisar Romawi, Julius Caesar. Sejak Julius Caesar, kaisar – kaisar Romawi menggunakan nama belakangnya sebagai gelar mereka. Kekaisaran disebut juga Kemaharajaan, yaitu suatu kesatuan politik yang mencakup wilayah geografik yang luas, membawahi banyak suku dan bangsa, yang dipersatukan dan dipimpin oleh kaisar dan membentuk sebuah kerajaan. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Kekaisaran>).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kaisar adalah pemimpin suatu negara di suatu negara.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Teknik ini digunakan dengan memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan tema penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Bab I, Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Bab ini memaparkan tentang gambaran Jepang, yang berisikan tentang bentuk pemerintahan Jepang, awal mula terbentuknya negara Jepang, dan pembabakan zaman di Jepang.

Bab III, Bab ini membahas tentang sejarah perkembangan kedudukan kaisar di Jepang.

Bab IV, Kesimpulan.